

Nama	Laode Muh. Agum Gamara
NIP	199909092022031005
Angkatan	CX (101)
Kelompok	2
Nomor Absen	17
UPT	Rutan Kelas I Makassar

Deskripsikan Bagaimana KOMPETENSI ASN yang seharusnya dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0?

Salah satu prioritas reformasi birokrasi Pemerintah Indonesia hingga 2024 yaitu mewujudkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), telah mencanangkan pembangunan “Smart ASN” 2024. Hal ini menjadi pondasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di Era Digital dan Revolusi Industri 4.0. Dalam menghadapi Era Digital, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, bahwa salah satu mandat yang harus segera dilaksanakan adalah percepatan SPBE. Selain itu, juga menjadi amanat dari Pasal 349 (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penerapan sistem berbasis elektronik dan terpadu akan membawa perubahan yang cepat dan dinamis bagi pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mendorong percepatan tersebut, kompetensi ASN khususnya dari generasi milenial menjadi salah

satu kunci dalam melaksanakan pemerintahan berbasis elektronik. Generasi milenial yang relatif “open minded”, cerdas, dan inovatif, didukung dengan karakteristik “Smart ASN” yang memiliki jiwa nasionalisme; integritas; wawasan global; komunikasi; keramahan; jejaring; dan wirausaha, akan membawa perubahan bagi pelayanan publik. Selain itu, komitmen pemerintah untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua stakeholders adalah upaya untuk menciptakan inovasi di bidang pemerintahan.

Tak dapat dimungkiri apabila tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik di level pusat hingga pemerintah daerah otonom masih tinggi. Hal ini dikarenakan pelayanan publik masih rendah dan belum mampu beradaptasi dengan zaman. Saat ini kita telah memasuki Revolusi Industri 4.0, yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, dan batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Reformasi Birokrasi hingga 2024 mendatang untuk memperkuat dan membangun model kelembagaan aparatur negara dan reformasi birokrasi kelas dunia. Tujuannya agar terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab perubahan secara efektif, sehingga pelayanan publik berkualitas dan berkelas dunia dapat terwujud.

Di Era Digital, tuntutan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif semakin tinggi. Sudah saatnya berbagai terobosan pemerintah berbasis elektronik diterapkan di semua level pemerintahan hingga pemerintah daerah. Kultur birokrasi juga harus menerapkan prinsip New Public Service dan pelayanan yang diaplikasikan oleh swasta agar setiap warga negara benar-benar merasakan pelayanan prima yang responsif. Kita tentunya dapat membandingkan antara birokrasi masa lalu yang tidak menggunakan ICT/E-GOV, yaitu minimnya inovasi, kaku, mengabaikan profesionalisme, cenderung otoriter, dan peluang pungli lebih besar. Sedangkan dengan sistem elektronik, memungkinkan adanya kreativitas, inovasi,

profesionalisme, transparansi, dan peluang KKN yang kecil karena dikelola oleh sistem.

Berbicara tentang “Smart ASN” dan pelayanan publik berkelas dunia, salah satu variabel yang sangat berkaitan adalah melihat Indeks Daya Saing Global dari World Economic Forum (WEF). Ada 12 indikator utama, seperti daya saing dalam hal institusi, infrastruktur, adaptasi teknologi, stabilitas ekonomi, kesehatan, skill, produk, pasar tenaga kerja, sistem finansial, besaran pasar (jumlah penduduk), pergerakan bisnis, dan kemampuan inovasi. Sejak 2018, terjadi penekanan pada indikator terkait kesiapan dunia menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Pada 2018, Indonesia mengalami pergeseran dengan menduduki peringkat ke-45 dari 140 negara. Dari hal tersebut, daya saing Indonesia terkait semua indikator memang harus didongkrak. Selain itu, efektifitas pemerintahan Indonesia juga merupakan hal yang menjadi konsen. Pasalnya, persaingan yang dihadapi Indonesia bukanlah antar instansi pemerintah, tapi jauh lebih kompleks karena persaingannya di tingkat global. Untuk itulah perlu adanya standar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja “Smart ASN” yang didasarkan pada budaya pelayanan yang baik. Mulai dari penguasaan sosio kultural, bahasa, dan yang terutama adalah penguasaan IT untuk menghadapi kondisi persaingan global.

Selain Indeks Daya Saing Global, sistem pemerintahan berbasis elektronik juga harus dilihat dari perankingan dalam survei e-Government, yang dilakukan United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa). PBB melakukan asesmen pada seluruh web atau situs kementerian dan nasional di semua negara anggotanya. Keberadaan web di segala ranah dan institusi, kelengkapan fitur, berbagai layanan online, dan adanya respon serta dokumentasi terhadap partisipasi masyarakat menjadi hal-hal utama yang dilihat dalam e-government survey. Pada 2018, Indonesia berada pada peringkat 107

dari 193 Anggota PBB dalam E-Government Survey. Berikut perbandingannya dengan negara-negara di ASEAN